



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://klipping.dpr.go.id

Judul : Memperkuat Citra dan Kinerja DPR
Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

2 | Politik&Hukum

KOMPAS, SENIN, 25 OKTOBER 2021

Memperkuat Citra dan Kinerja DPR

Citra parlemen di hadapan publik masih belum membaik. Tak hanya kinerja pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang dinilai masih lemah, gaya hidup mewah anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga membuat publik menilai minor lembaga itu. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah anggota dan pimpinan mengakibatkan kepercayaan publik kepada DPR juga kian tergerus.

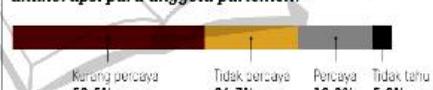
Menurut Anda, apakah anggota parlemen di Indonesia telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang cukup?



Menurut Anda, apakah besarnya pendapatan yang didapatkan oleh para anggota parlemen sebanding dengan kinerja mereka selama menjabat?



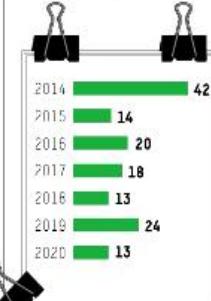
Seberapa percaya Anda terhadap integritas antikorupsi para anggota parlemen?



Menurut Anda, apakah penggunaan dana yang ditujukan untuk masyarakat oleh anggota parlemen sudah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?



Jumlah UU yang Disahkan (RUU Prioritas dan RUU Kumulatif Terbaik)



Metode Penelitian

Angkupuan kliping ini dilakukan dengan metode wawancara telepon. Sampel kliping ini diambil dari seluruh Indonesia. Seluruh 509 responden berusia minimal 17 tahun dan 34 provinsi termasuk ibu kota. Sampel ini merupakan hasil dari survei respon paralel dilakukan oleh Kompas assosiates. Untuk survei dilakukan di 14 provinsi. Metodologi survei ini adalah teknik keterwakilan 95 persen, representasi penelitian ± 4,54 persen dan 95% konsistensi sampel analisis sebenarnya. Metode survei ini bersifat eksploratif dan korelatif, bersifat deskriptif dan korelatif.

K

INFOGRAPHIC: LUTHIE



KOMPAS, SENIN, 25 OKTOBER 2021

2 | Politik&Hukum

Memperkuat Citra dan Kinerja DPR

Peringatan Hari Parlemen Nasional pada 16 Oktober 2021 ini, merupakan momentum untuk memperkuat komitmen peran DPR agar lebih dekat dengan suara dan kepentingan rakyat. Potensi komunitas legislatif yang selama ini memiliki beragam dengan aspirasi publik menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Masih belum membahagiakan DPR maupun dari hasil survei tatau kali periodik yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober ini. Persepsi publik yang masih tetap buruk kepada DPR ini mencakup rata-rata hanya separuh responden yang merasa takut atau cemas akan legislatif masing-masing tersebut baik. Sedangkan responden lain menyatakan sebaliknya.

Persepsi publik yang masih merasa takut dari fungsional legislatif ini tidak lepas dari penilaian bahwa perlakuan anggota DPR cenderung jauh dari kehidupan rakyat yang diwakili. Dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 16 Oktober ini, terdapat sebagian besar responden yang merasa tidak puas dengan perlakuan anggota DPR.

Majoritas responden (lebih dari 88 persen) menilai anggota parlemen di Indonesia tidak diperlakukan dengan kebaikan hidupan mewah. Bahkan, separuh lebih dari antara responden menilainya sangat mewah. Isu mendidihnya gaji anggota parlemen juga tak hanya mendarat pada anggota DPR di Jakarta. Pasalnya, sekitar tiga perempat responden memandang gaya

hidup anggota legislatif daerah (DPRD) juga tak jauh beda. Meskipun jumlah penghasilan para anggota legislatif ini dinilai kurang sebanding dengan kinerjanya. Sebagian besar dari responden mendapat kinerja anggota DPR/DPRD yang belum berhasil dianggap setara dengan melimpahnya penghasilan yang didapatkan. Hanya sekitar seperempat responden yang merasa kinerja anggota DPR/DPRD tidak berbanding lurus dengan bayaran yang maha.

Potret penilaian kemewahan yang kurang berkorelasi dengan kinerja anggota DPR/DPRD yang dipersepsi publik saja. Data kinerja DPR menyebutkan, pencapaian dalam penyelesaian pembentukan undang-undang tap. tahun cenderung belum optimal. Pada 2020, misalnya, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) prioritas, hanya 13 undang-undang yang disahkan. Namun, sebuah hasil merupakan RUU kumulatif tersebut.

Pandemi Covid-19 sedang terjadi dan kerahasiaan reses bisa jadi penghambat bagi kinerja parlemen. Namun, jika dilihat tahun sebelumnya, kinerja DPR justru melampaui hasil tahun sebelumnya. Capaian legislatif yang standar sama dengan capaian pada 2018 ketika situasi masih relatif normal.

Sedangkan kinerja yang belum sebanding publik juga menyebut pemakaian dana reses anggota DPR yang secara teori diberikan untuk berupaya memperbaiki kondisi di tanah air. Ratusan miliar masing-masing. Dana tersebut dipakai untuk membiayai berbagai kegiatan penyampaian aspirasi rakyat, yang hasilnya akan kembali kepada rakyat.

Namun, publik tampaknya belum melihat implementasi

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

dari kesiapan penyampaian aspirasi ini. Sebanyak 77 persen responden dalam jajak pendapat ini kurang atau tidak merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Meskipun, bisa jadi, ada mispersepsi pemahaman publik bahwa dana reses adalah dana publik yang seharusnya diberikan atau dihibahkan sebagai bentuk bantuan materi.

Akuntabilitas

Kerugian publik juga tampak didasarkan pada anggapan masyarakat tentang pengeluaran dan transparansi pengeluaran dana reses anggota DPR. Hampir separuh responden memandang penggunaan dana ini cenderung kurang akuntabel dan tidak transparan.

Isu dana reses semakin ramai diperbincangkan publik setelah adanya pengakuan dari anggota Komisi IX DPR, Krisdayanti, dalam sidang Yudikorsus kasus Izal Uncensored di 13 September 2021. Dalam pengakuanannya, Krisdayanti menyengkap bagaimana dana reses itu dikurangi. Meskipun dana itu langsung mengalami ke rekening pri-

bat anggota DPR.

Besarnya gaji bulanan, dana reses, hingga dana aspirasi tampan, masih menjadi sumber pokok abu-abu. Jika gaji bulanan merupakan hak anggota DPR/DPRD yang langsung ditentukan oleh anggota DPR, dana reses dan dana aspirasi bersifat tidak langsung (berdasarkan pengajuan proposal) dan harus mendapat persetujuan

dan pengawasan lembaga DPR/DPRD.

Menurutnya, jika dilihat untuk ukuran total, total gaji anggota DPR plus dana reses/aspirasi dalam setahun ternyata belum hingga miliaran rupiah. Namun, jumlah dana reses dan aspirasi yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan ribuan konstituen di berbagai wilayah, contohnya bisa lain. Dapat diketahui, setiap reses dana reses dan aspirasi yang diberikan atau dihibahkan sebagai bentuk bantuan materi.

Perluasan transparansi dan pertanggungjawaban dana reses ini, menurut DPRD Comptroller, Irwan Suryadi, adalah penting. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaannya kini mendapat perhatian dan dipertanyakan.

Secara teknis, sebutulnya juga diperlukan dana ini juga diawasi negara. Tiap tahun, dana reses yang diberikan oleh anggota DPR/DPRD yang langsung ditentukan oleh anggota DPR, dana reses dan dana aspirasi bersifat tidak langsung (berdasarkan pengajuan proposal) dan harus mendapat persetujuan

dak percaya terhadap integritas antikorupsi para anggota dewan.

Juruloyla persepsi publik ini sejalan dengan banyaknya anggota DPR ataupun DPRD yang ditahan KPK ketika terjerat kasus korupsi. Dari 2018, misalnya, lebih dari 100 anggota DPR/DPRD terbukti korupsi. Jika dilihat secara total kasus korupsi saat itu, lebih dari 40 persen dilakukan oleh anggota DPR.

Hari ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang semakin mengintegrasikan transparansi potensi anggota legislatif untuk korupsi. Data laporan tahunan KPK 2020 juga menyebutkan sebanyak 21 anggota DPR dan DPRD yang dilantik tersangka korupsi. Jumlah ini setara dengan hampir 20 persen dari total tersangka korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2020.

Kasus korupsi di DPR tidak hanya menyerpih para anggota, tetapi juga pejabat. Kasus terburuk di periode ini adalah dilantiknya Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (Partai Golkar). Pada periode sebelumnya, Ketua DPR, Setia Novanto (Golkar), dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurdiwian (Partai Amanat Nasional) juga terjerat korupsi.

Perbaikan dana reses ini, tetapi juga dengan potensi korupsi semakin menambah beban untuk berbenah, memperbaiki citra dan kepercayaan publik. Tentu saja, kepercayaan publik tidak akan bisa dikembalikan dalam waktu singkat. Perlu pembuktian serius dari anggota parlemen bahwa mandat yang diberikan rakyat tidak disaksikan.

ORANGGA EKA SAKTI/
LITBANG KOMPAS